

KOTA MADIUN



# LAPORAN KINERJA

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

## TAHUN ANGGARAN 2024

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan pada Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kekuatan dan rahmat-Nya Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Madiun Tahun 2024 ini tersusun sebagaimana mestinya.

Dengan disusunnya LKJ ini, maka informasi seputar pelaksanaan Tugas dan Fungsi BAPPEDA secara umum dan sebagai pertanggungjawaban Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atas pelaksanaan tugas dan fungsinya telah terdokumentasikan. LKJ ini nantinya dapat memberikan informasi dalam rangka akuntabilitas kinerja BAPPEDA pada Tahun 2024. Dengan adanya informasi tersebut, diharapkan dapat dijadikan acuan dalam merencanakan kegiatan pada tahun berikutnya, sehingga dapat dilakukan upaya-upaya peningkatan/perbaikan pada sistem pelaksanaan tugas di BAPPEDA Kota Madiun.

Demikian Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Madiun Tahun 2024. Atas kerjasama dari pihak-pihak terkait, disampaikan terima kasih.

Madiun, 19 Maret 2025

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KOTA MADIUN**



**Ir. SUWARNO, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196510161986031010

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	Hal i
<b>Daftar isi</b> .....	ii
<b>BAB. I PENDAHULUAN</b> .....	1
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Landasan Hukum .....	1
I.3 Tujuan .....	2
I.4 Gambaran Umum .....	2
I.4.1 Struktur Organisasi.....	4
I.4.2 Permasalahan.....	5
I.4.3 Isu Strategis.....	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	8
II.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA .....	9
II.2 Indikator Kinerja Utama .....	11
II.3 Perjanjian Kinerja .....	11
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	13
III.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	13
III.1.1 Realisasi Kinerja Tahun 2024 .....	13
III.1.2 Perbandingan Realiasasi tahun ini dengan tahun sebelumnya.....	15
III.1.3 Perbandingan tahun ini dengan periode sebelumnya ...	17
III.2 Realisasi Anggaran .....	18
III.3 Efisiensi .....	19
III.4 Pelaksanaan Gender .....	19
III.5 Inovasi .....	20
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	22
Lampiran	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1 LATAR BELAKANG**

Guna Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa menjadi harapan setiap bangsa. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali berubah dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menjadi arahan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan terciptanya good governance. Agar terciptanya good governance dimaksud diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review atas Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Madiun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

#### **I.2 LANDASAN HUKUM**

Dalam penyusunan Laporan Kinerja BAPPEDA Tahun 2024, berikut peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum :

1. PERMENPAN NO. 53 TAHUN 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024.

## LAPORAN KINERJA BAPELITBANGDA 2024

4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
5. Peraturan Walikota Madiun Nomor Peraturan Walikota Madiun Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah.
6. Peraturan Walikota Madiun Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2019.
7. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
8. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.

### 1.3 TUJUAN

Laporan Kinerja ini merupakan pertanggungjawaban Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk menilai keberhasilan program dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan Tujuan, Misi, dan Visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Pelaporan Kinerja bertujuan untuk memberikan :

1. Peningkatan akuntabilitas (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah).
2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah).
3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas sebagai rekomendasi tindak lanjut tahun berikutnya.
4. Sebagai salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan Pimpinan.

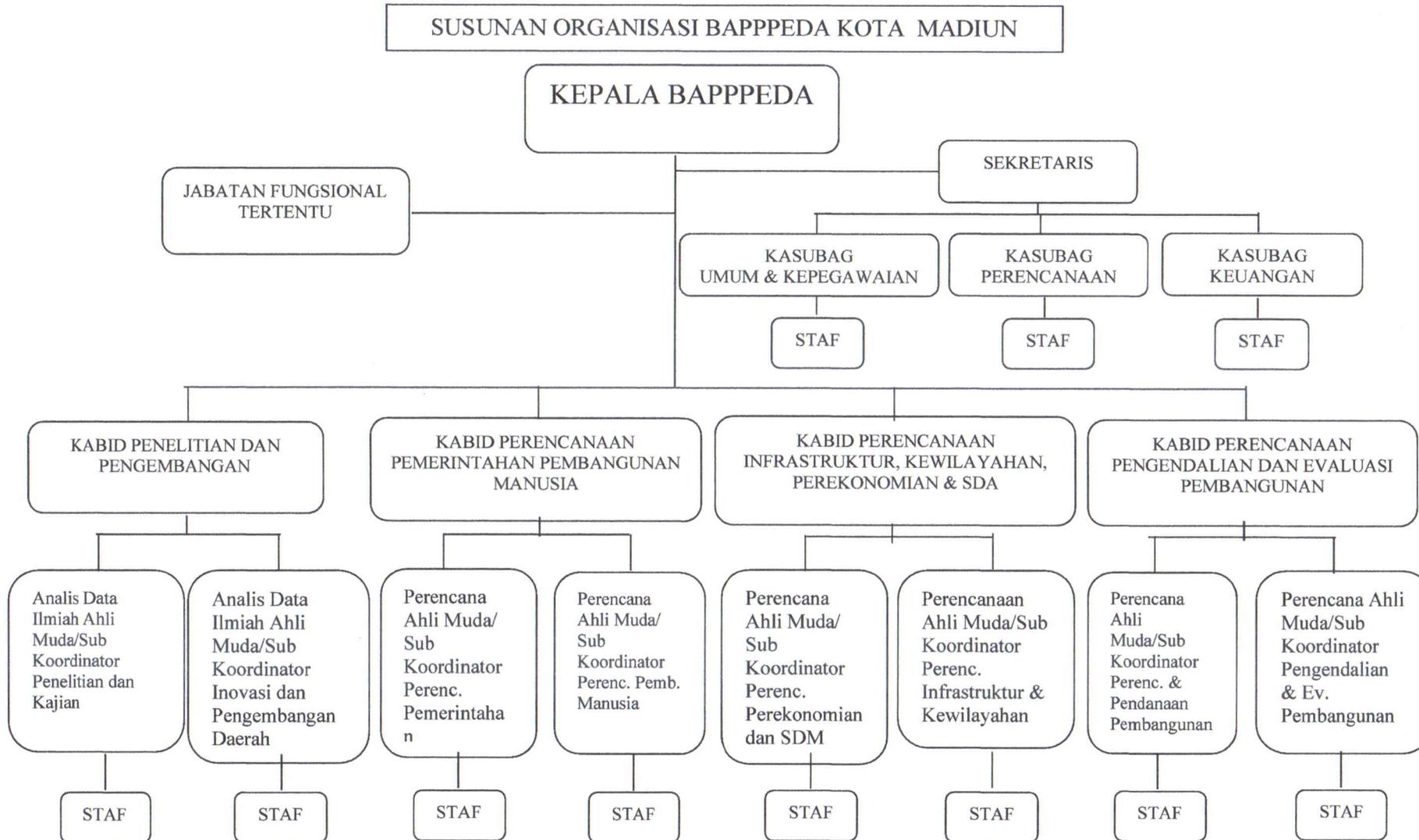
### 1.4 GAMBARAN UMUM

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA) Kota Madiun merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kedudukan BAPPPEDA Kota Madiun adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugasnya BAPPPEDA berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi BAPPPEDA tersebut diatur dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor Peraturan Walikota Madiun Nomor 83 Tahun 2021.

1.4.1 Struktur Organisasi

Gambar 1.1



**Tugas Pokok :**

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Madiun masuk dalam lingkup lembaga teknis daerah, mempunyai tugas pokok "memimpin, merencanakan, mengembangkan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas BAPPEDA mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan pembangunan daerah ;
- c. Pengordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- e. Pelaksanaan evaluasi atas penyelenggaraan pembangunan ;
- f. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Madiun melaksanakan 2 (dua) urusan pemerintahan, yaitu :

1. Bidang Urusan Perencanaan
2. Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan

**1.4.2 Permasalahan**

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BAPPEDA Kota Madiun dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

**Permasalahan yang dihadapi terkait dengan urusan pemerintahan bidang urusan perencanaan adalah sebagai berikut:**

- **Prioritas sasaran kinerja belum mendapatkan Sumber Daya yang memadai (SDM dan Anggaran)**

Setiap tahun terdapat tahapan perubahan perencanaan penganggaran dalam rangka penyesuaian target kinerja dan pagu anggaran. Rata-rata Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

## LAPORAN KINERJA BAPELITBANGDA 2024

Kota Madiun melakukan pengajuan perubahan (penambahan) anggaran dengan berdasar pada prioritas pembangunan.

- **Kualitas koordinasi antar perangkat daerah dalam menghadapi dinamika perubahan peraturan perundang-undangan belum optimal.**

Setiap tahun dilakukan evaluasi internal terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintahan Kota Madiun. Hasil Laporan Evaluasi tersebut setiap tahunnya didapati bahwa dokumen perencanaan di hamper seluruh perangkat daerah mengalami inkosistensi data dengan dokumen Sasaran Kinerja Pegawai/Perjanjian Kinerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

- **Pemenuhan data yang digunakan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan masih belum optimal/tidak sesuai jadwal.**

Data IKD diperoleh dari Perangkat Daerah sesuai bidang urusan. Akan tetapi, Perangkat Daerah masih mengalami kesulitan dalam memberikan data dukung tersebut.

- **Nilai Akuntabilitas pada komponen Perencanaan Hasil Evaluasi Kemenpan RB RI belum maksimal.**

Setiap tahun Kementrian PAN dan RB melakukan evaluasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Hasil Evaluasi menyatakan bahwa nilai akuntabilitas pada komponen perencanaan mengalami peningkatan kecuali pada Tahun 2023.

- **Masih terdapat perbedaan kegiatan beserta anggaran yang belum sepenuhnya**

Berdasarkan Evaluasi SAKIP Tahun 2024 terdapat rekomendasi untuk penyesuaian data dan informasi substansi renstra masih didapati tidak sinkron antara indikator pohon kinerja dengan indikator program kegiatan.

- **Keselarasan RAD tematik dengan RPJMD belum optimal.**

Masih terdapat Perangkat Daerah yang menyampaikan data dukung melebihi batas waktu.

**Permasalahan yang dihadapi terkait dengan urusan pemerintahan bidang urusan penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut:**

- **Belum optimalnya antusiasme dan partisipasi Perangkat Daerah/masyarakat dalam melakukan inovasi.**

Keikutsertaan inovasi belum maksimal, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Kekurangpahaman innovator terhadap persyaratan data dukung pelaporan inovasi.

### **1.4.3 Isu Strategis**

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Oleh karena itu, analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Jika tidak diperhatikan dan diantisipasi, maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA, terdapat beberapa isu strategis yang perlu diantisipasi, diantaranya :

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Inovasi Daerah.
2. Perencanaan penganggaran yang holistic, tematik, terintegrasi dan spasial.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Dalam menjalankan tugas dan fungsi BAPPPEDA, BAPPPEDA memiliki Renstra BAPPPEDA Tahun 2019-2024. Renstra tersebut, salah satunya berpedoman pada RPJMD Perubahan Kota Madiun Tahun 2019-2024. Berikut adalah peta kinerja BAPPPEDA Kota Madiun dalam mendukung pencapaian Visi Misi Kepala Daerah Kota Madiun dalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024.

Tabel 2.1

Keterkaitan RPJMD Perubahan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2019-2024  
dengan Renstra Perubahan BAPPPEDA Tahun 2019-2024

<b>RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024</b>	
Misi 1	: Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"
Tujuan	: Terwujudnya Kualitas Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis Smart Cities, dengan indikator :
	Nilai Reformasi Birokrasi
Sasaran 1	: Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan indikator :
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan</li> <li>• Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah</li> </ul>
Sasaran 2	: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator :
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)</li> <li>• Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</li> <li>• Indeks Inovasi Daerah</li> </ul>

<b>Renstra Perubahan BAPPEDA Tahun 2019-2024</b>	
Tujuan	: Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkualitas, dengan indikator :
	Nilai SAKIP pada komponen perencanaan
Sasaran 1	: Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran, dengan indikator :
	Nilai SAKIP pada komponen perencanaan
Sasaran 2	: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tematik Pembangunan, dengan indikator :
	Persentase perencanaan tematik daerah yang sinkron dengan RKPD
Sasaran 3	: Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah, dengan indikator :
	Indeks Inovasi Daerah
Sasaran 4	: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik pada Bapelitbangda Kota Madiun
	Indeks Pelayanan Publik

Tujuan disusunnya Perencanaan Kinerja ini adalah untuk membuat suatu dokumen perencanaan dibidang perencanaan pembangunan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi serta sasaran-sasaran dan program yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan. Dengan demikian maka Perencanaan strategis OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun menjadi Landasan bagi penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja OPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

## **II.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA**

Dengan berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan, dalam RPJMD, amak selanjutnya dirumusan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi Walikota dan Wakil Walikota Madiun.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD beserta indikator kinerja disajikan dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Tujuan BAPPPEDA

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
			1	2	3	4	5	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran	Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan	23	24	24,5	26	26	Skor
2.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tematik Pembangunan, dengan indikator	Persentase perencanaan tematik daerah yang sinkron dengan RKPD	100	100	100	100	100	%
3.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	-	-	-	55	58	indeks
4.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik pada BAPPPEDA Kota Madiun	Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	-	3,6	3,65

## II.2 Indikator Kinerja Utama

Tujuan dan Sasaran sebagaimana dimaksud pada sub bab II.2, juga dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama ( IKU ), IKU adalah kinerja prioritas utama yang ingin dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun dalam kurun waktu 5 tahun (2014 – 2019) yang merupakan penjabaran Rencana Strategis dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. Dengan telah disusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan pelaksanaan teknis kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun dapat lebih terencana, terpolada dan terpadu.

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun menetapkan Indikator Kinerja Utama yaitu :

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Utama (IKU)  
BAPPPEDA Kota Madiun Tahun 2019-2024

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun1	Tahun2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan	21,6	23	24	24,5	26	26	26
2	Persentase perencanaan tematik daerah yang sinkron dengan RKPD	100	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	-	-	-	-	55	58	68
4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik pada BAPPPEDA Kota Madiun	-	-	-	-	-	3,6	3,6

## II.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja disusun terkait dengan penetapan kebijakan anggaran dan merupakan komitmen bagi BAPPPEDA untuk mencapainya. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi sebagai sasaran, indikasi kinerja, dan target yang akan

## LAPORAN KINERJA BAPELITBANGDA 2024

dicapai. Perjanjian Kerja berikut merupakan Perjanjian Kinerja Kepala Badan yang nantinya juga dijabarkan ke dalam Perjanjian Kinerja eselon 3 dan 4 dalam bentuk program dan kegiatan.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Kepala BAPPPEDA adalah komitmen Kepala BAPPPEDA kepada Walikota Madiun atas pencapaian kinerja dengan Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama BAPPPEDA yang dilaksanakan pada Tahun 2024, yaitu :

### Perjanjian Kinerja Kepala BAPPPEDA Kota Madiun Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran	Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan	26 Skor
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tematik Pembangunan, dengan indikator	Persentase perencanaan tematik daerah yang sinkron dengan RKPD	100 %
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	58 indeks
4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik pada BAPPPEDA Kota Madiun	Indeks Pelayanan Publik	3,6 indeks

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### III.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sebagaimana telah disampaikan pada pengukuran kinerja pada bab II, maka nilai kinerja dan predikat capaian kinerja BAPPPEDA Tahun 2024 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis disajikan sebagai berikut :

##### III.1.1 Realisasi Kinerja Tahun 2024

TABEL 3.1  
REALISASI KINERJA TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran	Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan	26 Skor	26 Skor	100%
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tematik Pembangunan, dengan indikator	Persentase perencanaan tematik daerah yang sinkron dengan RKPD	100 %	100 %	100%
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	58 indeks	67,08 indeks	116%
4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik pada BAPPPEDA Kota Madiun	Indeks Pelayanan Publik	3,6 indeks	3,6 indeks	100%

Dari tabel tersebut, dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran

Sasaran ini diukur dengan Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan, bahwa semakin tinggi skor, dengan skor maksimal 30, maka kualitas perencanaan dan penganggaran semakin berkualitas (semakin dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel). Tahun 2024 target atas

indikator ini adalah 26 dengan satuan skor, target tersebut tercapai dengan realisasi 26 capaian 100%.

Faktor pendorong :

Adanya sistem aplikasi manekin terintegrasi, dimana perencanaan kinerja sudah

terintegrasi dengan manajerial tata kelola pemerintahan lainnya.

Faktor penghambat :

Penggunaan aplikasi belum optimal.

### **2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tematik Pembangunan**

Sasaran ini diukur dengan Persentase perencanaan tematik daerah yang sinkron dengan RKPD. Tahun 2024 target atas indikator ini adalah 100% dengan satuan persen (%), target tersebut tercapai dengan realisasi 100%, sehingga capaian 100%. Pada Tahun 2024 terdapat 3 tema besar pembangunan, yaitu :

- Penguatan Tata Kelola Pemerintahan;
- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; serta
- Peningkatan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Dari masing-masing tema tersebut, terdapat sub-sub tema yang nantinya akan menjadi rencana aksi daerah, rencana aksi daerah tersebut wajib selaras dengan dokumen perencanaan pennggaran yaitu RKPD yang berbasis RPJMD.

Faktor pendorong :

Supporting anggaran yang memadai.

Faktor penghambat :

Proses manajerial penanganan perencanaan tematik (smart city, SPBE, dan lainnya ) belum optimal, karena volume pekerjaan yang semakin bertambah di Lingkungan Perangkat Daerah, sedangkan pegawai semakin berkurang.

### **3. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah**

Sasaran ini diukur dengan Indeks Inovasi Daerah, bahwa semakin tinggi skor maka kuantitas dan kualitas inovasi di Kota Madiun semakin meningkat. Tahun 2024 target atas indikator ini adalah 58 dengan satuan indeks, target tersebut tercapai dengan realisasi 68 capaian 116%.

Faktor pendorong :

Adanya dukungan dari Perangkat Daerah terkait publik berbasis System Informasi dan Teknologi Serta Inovasi.

Faktor penghambat :

Penjaringan inovasi masih belum optimal

#### **4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik pada BAPPEDA Kota Madiun**

Sasaran ini diukur dengan Indeks Pelayanan Publik, bahwa semakin tinggi skor, dengan skor maksimal 30, maka pelayanan publik yang dilakukan oleh BAPPEDA Kota Madiun semakin meningkat. Tahun 2024 target atas indikator ini adalah 3,6 dengan satuan indeks, target tersebut tercapai dengan realisasi 3,6, sehingga capaiannya adalah 100%

Faktor pendorong :

Dukungan pimpinan, koordinasi, anggaran dan OPD terkait dalam Mengembangkan pelayanan publik berbasis System Informasi dan Teknologi Serta Inovasi.

Faktor penghambat :

Keterbatasan petugas pelayanan yang sesuai kompetensi.

Pada Tahun 2024, Pemerintah Kota Madiun mendapatkan penghargaan IGA kategori Kota sangat inovatif, dimana BAPPEDA selaku koordinator dalam tim tersebut.

### **III.1.2 Perbandingan Realisasi Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya**

Untuk melihat tren kinerja BAPPEDA Kota Madiun, maka dapat dilihat perbandingan realisasi tahun sekarang dengan tahun sebelumnya, apakah mengalami peningkatan, tetap, atau penurunan. Pertumbuhan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.3  
PERBANDINGAN CAPAIAN SASARAN TAHUN 2022 DENGAN TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	2023				2024				Keterangan
			Target	Realisasi	Satuan	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Satuan	Capaian Kinerja	
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran	Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan	26	26	skor	100%	26	26	skor	100%	tetap
2	Kualitas Perencanaan Tematik Pembangunan, dengan indikator	Persentase perencanaan tematik daerah yang sinkron dengan RKPD	100	100	%	100%	100	100	%	100%	tetap
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	58	52,62	indeks	91%	58	67,08	indeks	116%	meningkat
4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik pada BAPPPEDA Kota Madiun	Indeks Pelayanan Publik	86	87,96	indeks	102%	3,6	3,6	indeks	100%	Ada perubahan penghitungan, tetapi realisasi tetap tercapai

**III.1.3 Perbandingan Tahun Ini Dengan Periode 2019- 2024**

Kinerja BAPPPEDA Tahun 2023 jika dilihat dalam periode 5 tahun (2019-2024) disajikan tabel perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan periode tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

**TABEL 3.4  
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DALAM PERIODE 2019-2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDKATOR SASARAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024	CAPAIAN AKHIR PERIODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran	Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan	21 skor	22 skor	23 skor	26 skor	26 skor	26 skor
2.	Kualitas Perencanaan Tematik Pembangunan, dengan indikator	Persentase perencanaan tematik daerah yang sinkron dengan RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	-	-	-	52,62 indeks	67,08 indeks	67,08 indeks
4.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik pada BAPPPEDA Kota Madiun	Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	87,96	3,6	3,6 (terdapat perubahan penghitungan)

## LAPORAN KINERJA BAPELITBANGDA 2024

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa kinerja pada keempat sasaran tersebut mengalami tren peningkatan.

### III.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Bapelitbangda adalah sebagai berikut :

**TABEL 3.5**  
**REALISASI ANGGARAN**  
**YANG MENDUKUNG SASARAN TAHUN 2024**

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Serapan (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.730.776.193	6.211.322.470	80
		2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.026.300.083	1.675.533.171	83
		3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.810.913.400	1.764.748.432	97
		4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.681.866.000	1.604.308.049	95
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>			<b>13.730.776.193</b>	<b>11.255.912.122</b>	<b>85</b>

### III.3 Efisiensi

Dari realisasi anggaran tersebut di atas dapat diukur efisiensi penggunaan anggaran dengan rumus sebagai berikut :

Efektifitas dan efisiensi = Pertumbuhan rata-rata kinerja - pertumbuhan realisasi anggaran

**TABEL 3.6**  
**PERTUMBUHAN KINERJA**

Sasaran	Kinerja Tahun 2023				Kinerja Tahun 2024				selisih realisasi kinerja tahun 2024- tahun 2023
	target	realisasi	satuan	capaian	target	realisasi	satuan	capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 7-3
sasaran 1	26	26	skor	100%	26	26	skor	100%	0
sasaran 2	100	100	%	100%	100	100	%	100%	0
sasaran 3	58	52,62	indeks	91%	58	67,08	indeks	116%	14,46
sasaran 4	86	87,96	indeks	102%	3,6	3,6	indeks	100%	0
Rata-rata pertumbuhan capaian kinerja									3,615

Capaian sasaran kinerja 2024 terlaksana dengan realisasi anggaran sebesar 11.255.912.122. Besaran tersebut meningkat 16% dari Tahun 2023, yaitu 9.664.648.747. Dengan demikian maka disimpulkan bahwa anggaran yang direalisasikan telah efektif dikarenakan kinerja semakin meningkat (pertumbuhan kinerja positif, yaitu 3,6%), tetapi belum efisien karena pertumbuhan realisasi anggaran lebih besar yaitu 16% (pertumbuhan anggaran lebih besar daripada pertumbuhan kinerja).

### III.4 Pelaksanaan Gender

Penerima manfaat atas pelaksanaan Kinerja dan Anggaran BAPPEDA adalah Perangkat Daerah, seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sejumlah 29 Perangkat Daerah

memiliki akses yang sama dalam mendapatkan informasi, baik secara langsung maupun berupa konsultasi. Dengan demikian BAPPPEDA telah menjalankan Responsif Gender kepada penerima manfaat atas kinerja anggaran yang dilaksanakan.

### **III.5 Inovasi**

Inovasi yang dilaksanakan oleh BAPPPEDA, antara lain :

#### **1. E-KAK > SIARAN**

Inovasi e KAK merupakan inovasi terintegrasi yang menyediakan data dan informasi Kerangka Acuan Kerja secara komprehensif dan tersistem guna mendukung penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Sebelum adanya inovasi e KAK dalam perencanaan sektoral seperti Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), Manajemen Resiko, Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek kegiatan membutuhkan adanya Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai data dukung dalam perencanaan. Masing-masing Perangkat Daerah harus menyusun berulang kali untuk melengkapi data dukung tersebut. Selain itu dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai pengukuran kinerja pegawai belum menerapkan keselarasan antara sasaran kinerja berjenjang mulai dari Kepala Dinas/Badan hingga pelaksana. Oleh karena itu, aplikasi e-KAK yang terintegrasi dibangun untuk memudahkan OPD agar lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan rencana kerja, karena dalam aplikasi e-KAK ini sudah tersistem dan terintegrasi dengan aplikasi perencanaan lainnya, mencakup komponen sasaran kinerja pegawai yang akan berpengaruh pada pemberian TPP, rencana aksi yang dilakukan untuk menunjang pencapaian tujuan, alokasi kebutuhan anggaran yang dibutuhkan, Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget

Statement (GBS) untuk mendukung perencanaan dan anggaran yang responsive gender (PPRG) serta Komponen Manajemen Resiko, sehingga seluruh komponen tersebut akan mendukung pencapaian SAKIP.

## 2. MANUSIA

Inovasi MANUSIA adalah inovasi terkait interoperabilitas data kependudukan, bahwa data kependudukan bisa dipakai bersama dengan pengaturan kemananan yang telah diperhitungkan. Dengan adanya aplikasi tersebut, maka biaya untuk pengelolaan data terkait kependudukan, salah satunya penanganan kemiskinan, dapat lebih efisien.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2024 merupakan pertanggung jawaban Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun 2024. Pertanggungjawaban tersebut meliputi capaian kinerja dan anggaran yang telah direncanakan sesuai dengan kesepakatan dengan Walikota Madiun yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Dengan disusunnya LKJ ini, semoga dapat memberikan informasi-informasi seputar pelaksanaan Tugas dan Fungsi BAPPEDA secara umum dan dapat dijadikan acuan dalam merencanakan kegiatan dan penentuan target-target kinerja pada tahun berikutnya, sehingga dapat dilakukan upaya-upaya peningkatan/perbaikan pada sistem pelaksanaan tugas di BAPPEDA Kota Madiun. Pada Tahun 2024. BAPPEDA memiliki 4 sasaran strategis dan tercapai seluruhnya.

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa tugas-tugas di lingkungan BAPPEDA telah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Namun demikian, upaya peningkatan masih terus dikerjakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

**PENETAPAN TARGET KINERJA TAHUN 2025  
BERDASARKAN REALISASI TAHUN 2024**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target 2024</b>	<b>Realisasi 2024</b>	<b>Target 2025</b>	<b>Keterangan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran	Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan	26	26	26,02	
2.	Kualitas Perencanaan Tematik Pembangunan, dengan indikator	Persentase perencanaan tematik daerah yang sinkron dengan RKPD/ Meningkatnya Capaian Kinerja Pembangunan	100%	100%	100%	
3.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	58	67,08	67,5	
4.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik pada BAPPPEDA Kota Madiun	Indeks Pelayanan Publik	3,6	3,6	3,65	



**WALI KOTA MADIUN**

## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. Suwarno, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Eddy Supriyanto, S.STP., M.PSDM.**

Jabatan : Pj. Wali Kota Madiun

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

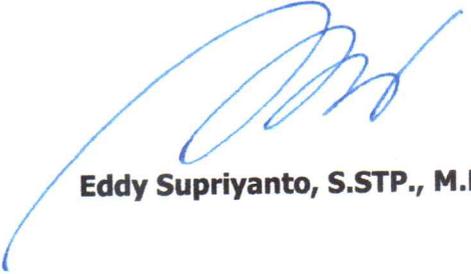
Kebhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

  
**Eddy Supriyanto, S.STP., M.PSDM.**

  
**Ir. Suwarno, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP 196510161986031010**



WALI KOTA MADIUN

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. SUWARNO ,M.Si**

Jabatan : **KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **EDDY SUPRIYANTO, S.STP., M.PSDM.**

Jabatan : **PJ WALIKOTA MADIUN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua,**

**EDDY SUPRIYANTO, S.STP.,M.PSDM**

Madiun, 02 Desember 2024

**Pihak Pertama,**

**Ir. SUWARNO ,M.Si**  
**NIP 196510161986031010**



**WALI KOTA MADIUN**

## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. SUWARNO, M.Si.**

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah  
Kota Madiun

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.**

Jabatan : Wali Kota Madiun

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, 8 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

  
**Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.**

  
**Ir. SUWARNO, M.Si.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP 196510161986031010**

**RENSTRA**

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Periode 2025-2026

## Tujuan

Tujuan OPD	Indikator	Rumus Perhitungan	Sumber Data	2025		2026	
				Target	Satuan	Target	Satuan
Terwujudnya perencanaan dan penganggaran daerah yang berkualitas	Nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja	Nilai diperoleh dari LHE SAKIP atas dokumen-dokumen perencanaan daerah Kota Madiun yang di evaluasi oleh Kemenpan RB	LHE SAKIP Kemenpan RB	25.8	skor/nilai	26	skor/nilai

Sasaran

No.	Sasaran OPD	Indikator	Rumus Perhitungan	Sumber Data	2025		2026	
					Target	Satuan	Target	Satuan
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran	Nilai SAKIP pada komponen perencanaan	hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB	bapelitbangda	25.8	skor	26	skor
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik pada Bapelitbangda Kota Madiun	Nilai Pelayanan Publik	penilaian RB berdasarkan Hasil Evluasi Inspektorat	Bapelitbangda	86	Skor	87	Skor
3	Meningkatnya Capaian Kinerja Pembangunan	persentase kinerja program yang mencapai target	jumlah program yang tercapai dibagi dengan jumlah program yang ada	Bapelitbangda	94	%	94	%
4	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Indeks inovasi daerah	indeks inovasi daerah di berikan oleh Kemendagri	Bapelitbangda	59	skor/indeks	60	skor/indeks

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Total Pagu OPD	2025	2026
	Rp. 12,997,038,445	Rp. 12,997,038,445

Kode Sub Opd	Nama Sub Opd	2025		2026	
			Pagu Indikatif		Pagu Indikatif
5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		Rp. 12,997,038,445		Rp. 12,997,038,445
Kode Urusan	Nama Urusan	2025		2026	
			Pagu Indikatif		Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		Rp. 12,997,038,445		Rp. 12,997,038,445
Kode Bidang Urusan	Nama Bidang Urusan	2025		2026	
			Pagu Indikatif		Pagu Indikatif
5.01	PERENCANAAN		Rp. 12,997,038,445		Rp. 12,997,038,445

D.U.I	PERENCANAAN	Rp. 11,575,951,445				Rp. 11,575,951,445			
Kode Program	Nama Program	2025				2026			
		Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai SAKIP Perangkat Daerah	89	skor	Rp. 7,603,865,282	nilai SAKIP Perangkat Daerah	90	skor	Rp. 7,603,865,282
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	2025				2026			
		Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja dan anggaran yang sesuai dengan ketentuan	100	%	Rp. 173,725,400	Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja dan anggaran yang sesuai dengan ketentuan	100	%	Rp. 173,725,400
Kode Subkegiatan	Nama Subkegiatan	2025				2026			
		Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6	dokumen	Rp. 142,489,200	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6	dokumen	Rp. 142,489,200
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan kinerja triwulan	4	dokumen	Rp. 11,050,600	jumlah dokumen laporan kinerja triwulan	4	dokumen	Rp. 11,050,600
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	2	dokumen	Rp. 20,185,600	jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	2	dokumen	Rp. 20,185,600
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	2025				2026			
		Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif

5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang sesuai dengan ketentuan	100	%	Rp. 5,592,990,000	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang sesuai dengan ketentuan	100	%	Rp. 5,592,990,000
Kode Subkegiatan	Nama Subkegiatan	2025				2026			
		Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN	100	%	Rp. 5,550,950,000	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN	100	%	Rp. 5,550,950,000
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	tersusunnya dokumen laporan keuangan perangkat daerah (E Monev)	12	dokumen	Rp. 42,040,000	tersusunnya dokumen laporan keuangan perangkat daerah(E Monev)	12	dokumen	Rp. 42,040,000
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	2025				2026			
		Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase kebutuhan administrasi pegawai yang terpenuhi	100	%	Rp. 245,427,692	persentase kebutuhan administrasi pegawai yang terpenuhi	100	%	Rp. 245,427,692
Kode Subkegiatan	Nama Subkegiatan	2025				2026			
		Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif
5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pelaksanaan pendidikan pelatihan yang mendukung tugas dan fungsi	2	kali	Rp. 154,098,312	Jumlah pelaksanaan pendidikan pelatihan yang mendukung tugas dan fungsi	2	kali	Rp. 154,098,312

		uan rangsi perencana				uan rangsi perencana			
5.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	persentase peraturan terkait administrasi kepegawaian yang tersosialisasikan	100	%	Rp. 91,329,380	persentase peraturan terkait administrasi kepegawaian yang tersosialisasikan	100	%	Rp. 91,329,380
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	2025				2026			
		Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum yang terpenuhi sesuai ketentuan	100	%	Rp. 455,934,000	Persentase kebutuhan administrasi umum yang terpenuhi sesuai ketentuan	100	%	Rp. 455,934,000
Kode Subkegiatan	Nama Subkegiatan	2025				2026			
		Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100	%	Rp. 455,934,000	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100	%	Rp. 455,934,000
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	2025				2026			
		Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase kebutuhan sarana dan prasarana kantor yang terpenuhi	100	%	Rp. 110,367,300	persentase kebutuhan sarana dan prasarana kantor yang terpenuhi	100	%	Rp. 110,367,300
Kode Subkegiatan	Nama Subkegiatan	2025				2026			
		Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif
5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan	persentase	100	%	Rp. 110,367,300	persentase	100	%	Rp. 110,367,300

	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kebutuhan sarana dan prasarana kantor yang terpenuhi				kebutuhan sarana dan prasarana kantor yang terpenuhi			
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	2025				2026			
		Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan jasa umum kantor	100	%	Rp. 841,261,325	persentase pemenuhan kebutuhan jasa umum kantor	100	%	Rp. 841,261,325
Kode Subkegiatan	Nama Subkegiatan	2025				2026			
		Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif
5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Rp. 0				Rp. 0
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase pemenuhan kebutuhan jasa umum kantor	100	%	Rp. 841,261,325	persentase pemenuhan kebutuhan jasa umum kantor	100	%	Rp. 841,261,325
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	2025				2026			
		Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik/siap digunakan	100	%	Rp. 184,159,565	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik/siap digunakan	100	%	Rp. 184,159,565
Kode Subkegiatan	Nama Subkegiatan	2025				2026			
		Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan	100	%	Rp. 108,838,000	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan	100	%	Rp. 108,838,000

	atau Kendaraan Dinas Jabatan	yang layak digunakan				yang layak digunakan			
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	100	%	Rp. 75,321,565	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	100	%	Rp. 75,321,565
Kode Program	Nama Program	2025				2026			
		Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan tingkat kota yang tersusun	100	%	Rp. 2,182,066,163	Persentase dokumen perencanaan tingkat kota yang tersusun	100	%	Rp. 2,182,066,163
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	2025				2026			
		Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	jumlah dokumen perencanaan penganggaran Pemerintah Daerah Kota Madiun	3	dokumen	Rp. 1,983,066,163	jumlah dokumen perencanaan penganggaran Pemerintah Daerah Kota Madiun	3	dokumen	Rp. 1,983,066,163
Kode Subkegiatan	Nama Subkegiatan	2025				2026			
		Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Publik	1	kali kegiatan	Rp. 152,104,370	Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Publik	1	kali kegiatan	Rp. 152,104,370
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	jumlah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas PD	1	kali kegiatan	Rp. 155,206,485	jumlah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas PD	1	kali kegiatan	Rp. 155,206,485
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan	1	kali kegiatan	Rp. 548,947,586	Jumlah Pelaksanaan	1	kali kegiatan	Rp. 548,947,586

		Musrenbang Kabupaten/Kota				Musrenbang Kabupaten/Kota			
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan	1	dokumen	Rp. 1,126,807,722	jumlah dokumen hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan	1	dokumen	Rp. 1,126,807,722
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	2025				2026			
		Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Pembangunan Pemda Kota Madiun	4	dokumen	Rp. 199,000,000	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Pembangunan Pemda Kota Madiun	4	dokumen	Rp. 199,000,000
Kode Subkegiatan	Nama Subkegiatan	2025				2026			
		Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	jumlah dokumen berita acara hasil verifikasi pengendalian rencana kerja perangkat daerah	2	dokumen	Rp. 99,000,000	jumlah dokumen berita acara hasil verifikasi pengendalian rencana kerja perangkat daerah	2	dokumen	Rp. 99,000,000
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi OPD	4	dokumen	Rp. 100,000,000	jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi OPD	4	dokumen	Rp. 100,000,000
Kode Program	Nama Program	2025				2026			
		Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Rencana Aksi Daerah (Tematik)	100	%	Rp. 1,588,000,000	Persentase Rencana Aksi Daerah (Tematik)	100	%	Rp. 1,588,000,000

		yang sinkron dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)				yang sinkron dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)			
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	2025				2026			
		Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	1	Dokumen	Rp. 528,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	1	Dokumen	Rp. 528,000,000
Kode Subkegiatan	Nama Subkegiatan	2025				2026			
		Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	persentase terlaksananya koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan	100	%	Rp. 81,000,000	persentase terlaksananya koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan	100	%	Rp. 81,000,000
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	jumlah penyusunan dokumen MOnev perencanaan bidang pemerintahan	1	dokumen	Rp. 110,000,000	jumlah penyusunan dokumen MOnev perencanaan bidang pemerintahan	1	dokumen	Rp. 110,000,000
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	persentase terlaksananya koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia	100	%	Rp. 330,581,500	persentase terlaksananya koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia	100	%	Rp. 330,581,500

5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi perencanaan pembangunan manusia	1	Laporan	Rp. 6,418,500	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi perencanaan pembangunan manusia	1	Laporan	Rp. 6,418,500
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	2025				2026			
		Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	1	dokumen	Rp. 410,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	1	dokumen	Rp. 410,000,000
Kode Subkegiatan	Nama Subkegiatan	2025				2026			
		Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen hasil koordinasi bidang perekonomian	1	dokumen	Rp. 400,000,000	jumlah dokumen hasil koordinasi bidang perekonomian	1	dokumen	Rp. 400,000,000
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang perekonomian	1	dokumen	Rp. 10,000,000	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang perekonomian	1	dokumen	Rp. 10,000,000
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	2025				2026			
		Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	1	dokumen	Rp. 650,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	1	dokumen	Rp. 650,000,000

Kode Subkegiatan	Nama Subkegiatan	2025				2026			
		Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen hasil koordinasi bidang infrastruktur	1	dokumen	Rp. 150,000,000	jumlah dokumen hasil koordinasi bidang infrastruktur	1	dokumen	Rp. 150,000,000
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang infrastruktur	1	dokumen	Rp. 200,000,000	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang infrastruktur	1	dokumen	Rp. 200,000,000
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen hasil koordinasi bidang kewilayahan	1	dokumen	Rp. 150,000,000	jumlah dokumen hasil koordinasi bidang kewilayahan	1	dokumen	Rp. 150,000,000
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang kewilayahan	1	dokumen	Rp. 150,000,000	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang kewilayahan	1	dokumen	Rp. 150,000,000
Kode Bidang Urusan	Nama Bidang Urusan	2025			2026				
				Pagu Indikatif			Pagu Indikatif		
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			Rp. 1,623,107,000			Rp. 1,623,107,000		

Kode Program	Nama Program	2025				2026			
		Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kajian/penelitian yang termanfaatkan sesuai isu strategis daerah	100	%	Rp. 1,623,107,000	Persentase hasil kajian/penelitian yang termanfaatkan sesuai isu strategis daerah	100	%	Rp. 1,623,107,000
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	2025				2026			
		Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase kajian/penelitian yang dilaksanakan sesuai rencana	100	%	Rp. 1,346,122,000	Persentase kajian/penelitian yang dilaksanakan sesuai rencana	100	%	Rp. 1,346,122,000
Kode Subkegiatan	Nama Subkegiatan	2025				2026			
		Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif
5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	jumlah dokumen penelitian/kajian	6	dokumen	Rp. 1,181,883,000	jumlah dokumen penelitian/kajian	6	dokumen	Rp. 1,181,883,000
5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	jumlah dokumen laporan hasil koordinasi data kelitbangan	1	dokumen	Rp. 164,239,000	jumlah dokumen laporan hasil koordinasi data kelitbangan	1	dokumen	Rp. 164,239,000
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	2025				2026			
		Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	jumlah dokumen pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi	2	dokumen	Rp. 276,985,000	jumlah dokumen pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi	2	dokumen	Rp. 276,985,000

Kode Subkegiatan	Nama Subkegiatan	2025				2026			
		Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif
		5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	jumlah dokumen pengembangan dan perencanaan di bidang teknologi dan inovasi	2	dokumen	Rp. 276,985,000	jumlah dokumen pengembangan dan perencanaan di bidang teknologi dan inovasi	2